



**INTERPRETASI KORUPSI DAN *POTLACH* DALAM PRAKTIK  
BIROKRASI PERGURUAN TINGGI DI KAMPUS JEMBER**

*THE INTERPRETATION OF CORRUPTION AND POTLACH IN THE PRACTICE  
OF COLLEGE BUREAUCRACY AT UNIVERSITIES IN JEMBER  
IN JEMBER CAMPUS*

**SKRIPSI**

Oleh

Aam Waro' Panotogomo

NIM. 140910302035

Dosen Pembimbing

1. Hery Prasetyo, S.Sos., M.Sosio

NIP. 198304042008121003

2. Lukman Wijaya Baratha, S.Sos., M.A

NRP. 760016803

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**





**INTERPRETASI KORUPSI DAN POTLACH DALAM PRAKTIK  
BIROKRASI PERGURUAN TINGGI DI KAMPUS JEMBER  
DI KAMPUS JEMBER**

*THE INTERPRETATION OF CORRUPTION AND POTLACH IN THE PRACTICE  
OF COLLEGE BUREAUCRACY AT UNIVERSITIES IN JEMBER  
IN JEMBER CAMPUS*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Sosiologi (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

**Aam Waro Panotogomo  
NIM 140910302035**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2018**

## PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan kasih dan sayang yang tiada batas. Serta limpahan salam semoga selalu tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua kandung saya, Ibunda Siti Afifah, Bapak Rusman, dan seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan dan doa.
2. Orang Tua, Guru, Sekaligus Sahabat yang selalu membimbing saya selama berada di Jember, Dr Alfian Fuhul Hadi beserta seluruh keluarga besar Masjid Sunan Kalijaga yang senantiasa memberikan dukungan dan doa
3. Keluarga Besar Civil Society Organization Future Leaders fo Anti Corupption Indonesia
4. Kepada dosen pembimbing, Bapak Lukman Wijaya Barata M.A yang sudah membimbing saya dalam pengerjaan skripsi hingga selesai.
5. Almamater Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember Program Studi Sosiologi yang saya banggakan, sebagai tempat penulis mendapatkan ilmu pengetahuan.

## MOTTO

Membiarkan terjadinya korupsi besar-besaran dengan menyibukkan diri pada ritus – ritus hanya akan membiarkan berlangsungnya proses pemiskinan bangsa yang semakin maju.

(KH Abdurrohman Wahid: *Tuhan Tidak Perlu di bela* halaman 87)

Yang Terpenting bukan apakah kita menang atau kalah, Tuhan tidak pernah mewajibkan manusia untuk menang sehingga kalah pun tidak berdosa, yang penting adalah apakah seseorang berjuang atau tidak berjuang.

(Emha Ainun Nadjib)

Untuk Menjadi Baik itu mudah, dengan hanya diam maka yang tampak adalah kebaikan. Yang sulit adalah menjadi bermanfaat, karena itu butuh perjuangan.

(KH. MA Sahal Mahfud)

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aam Waro' Panotogomo

NIM : 140910302035

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kerja ilmiah yang berjudul “Interpretasi Korupsi dan Potlach dalam Praktik Birokrasi Perguruan Tinggi di Kampus Jemberdi Kampus Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun dan bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 8 Oktober 2018

Yang menyatakan,

Aam Waro Panotogomo

140910302035

**SKRIPSI**

**INTERPRETASI KORUPSI DAN POTLACH DALAM PRAKTIK  
BIROKRASI PERGURUAN TINGGI DI KAMPUS JEMBER  
DI KAMPUS JEMBER**

*THE INTERPRETATION OF CORRUPTION AND POTLACH IN THE PRACTICE  
OF COLLEGE BUREAUCRACY AT UNIVERSITIES IN JEMBER  
IN JEMBER CAMPUS*

Oleh:

Aam Waro Panotogomo

140910302035

Pembimbing:

Hery Prasetyo, S.Sos., M.Sosio

NIP. 198304042008121003

Lukman Wijaya Baratha, S.Sos., M.A

NRP. 760016803

## RINGKASAN

**INTERPRETASI KORUPSI DAN POTLACH DALAM PRAKTIK BIROKRASI PERGURUAN TINGGI DI KAMPUS JEMBER DI KAMPUS JEMBER ;** Aam Waro' Panotogomo; 140910302035; 2018; Program Studi Sosiologi; Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik; Universitas Jember.

Korupsi menjadi problem klasik dalam masyarakat kita, pertemuan sistem birokrasi modern dengan sistem tradisional yang terlebih dulu ada dalam masyarakat kita, menjadi salah satu penyebab awal dari terjadinya perilaku korupsi itu. Lebih khusus dalam birokrasi perguruan tinggi di kampus jember, yang mana silang sengkabut antara birokrasi modern dan tradisionalitas sangat tampak dalam tata kelola birokrasi, yang akhirnya memberikan efek perilaku negatif berupa Korupsi, atau lebih khusus lagi soal *Potlach*.

Peneliti ini menggunakan konsep Korupsi dari Syed Hussein Alatas, yang menjelaskan bentuk dan bagaimana korupsi itu. Lebih khusus penelitian ini memberikan fokus pada *Potlach*, yang secara konsep juga beririsan dengan perilaku korupsi, penekanan *Potlach* ada pada makna dalam setiap pemberian, dan konsep *Potlach* yang peneliti gunakan adalah dari Marcel Mauss. Penelitian ini mengambil lokus riset nya pada beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta yang terdapat di Kabupaten Jember, nama perguruan tinggi tidak bisa saya sebutkan, sebagai upaya peneliti untuk melindungi informan.

Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode pendekatan fenomenologi, dengan memperhatikan data-data yang saya cari sangat bergantung pada pemaknaan setiap informan, dan saya menganggap dengan fenomenologi mampu mencari sesuatu yang mendalam untuk mendapatkan satu pemahaman yang mendetail, selain itu, intensionalitas yang ada dalam fenomenologi menjadi hal yang sangat saya butuhkan dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian ini di tentukan dengan Purposif Sampling, mengraahkan data sesuai dengan kebutuhan, infroman dalam penelitian ini di

antaranya adalah pejabat di lingkungan birokrasi perguruan tinggi seperti ketua jurusan, atau pimpinan lembaga dalam perguruan tinggi. Sementara itu untuk mengumpulkan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan dalam teknik analisis data, saya menggunakan *Interpretative phenomenology*.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa ada penyematan makna budaya dalam setiap perilaku korupsi, secara sadar dan sengaja dilakukan oleh individu dalam birokrasi perguruan tinggi, penyematan itu juga dilakukan secara sistemik, menggunakan sistem sebagai aspek mendasar dalam pelaksanaan pembubarannya, dan juga menggunakan sistem untuk merubah perilaku individu dalam birokrasi yang awalnya baik menjadi pelanggar aturan birokrasi. segala bentuk yang dinilai menyimpang dari aturan birokrasi, semua menjadi lazim karena mendapat penyematan makna budaya (Kulturalisasi), baik secara sistematis atau pun secara tidak sengaja. Setidaknya saya mengklasifikasi bentuk kulturalisasi menjadi dua, yaitu kulturalisasi secara individu dan kulturalisasi secara formal.

Secara sederhana yang menjadi pokok fundamental dalam konsep dan perilaku korupsi ini adalah hubungan-hubungan yang terbangun antar individu selalu berdasar pada prinsip pasar. Namun tidak adanya pasar yang kuat dan perilaku ekonomi yang di kendalikan oleh perhitungan-perhitungan rasional mendorong tumbuhnya hubungan-hubungan yang tergantung pada pertalian yang di tumbuhkan oleh adat kebiasaan dan kekuasaan yang menjurus ke arah nepotisme.

Selain itu, banyak interpretasi individu dalam birokrasi tentang sebuah Korupsi sebagai *Arisan, jatah, dan bagian dari sistem birokrasi*. interpretasi *potlach* juga bermacam-macam. Ada yang memaknainya sebagai bentuk *Shodaqoh, Jatah, uang tidak bertuan, barokah, ghonimah* dan beberapa interpretasi lain.

Berbagai bentuk proses yang saya temukan menunjukkan adanya kontinuitas atau keajegan yang terus dibangun dan di jaga, perilaku yang secara aturan dalam sistem birokrasi dilarang, namun secara terus menerus dilakukan, sehingga kesadaran akan perilaku yang dilarang akan hilang, dan berganti perilaku yang sebenarnya

dilarang menjadi dianggap boleh, hal ini terjadi karena kebiasaan yang terus menerus dilakukan. *Ber-sistem* dan terus berlanjut menjadi salah satu temuan yang cukup menarik dalam penelitian ini, bagaimana kemudian interpretasi korupsi lahir dari setiap individu, yang ada di dalam sistem birokrasi sekaligus ikut andil dalam keberlanjutan perilaku korupsi yang telah membentuk sistem. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Alatas, bahwa untuk menghasilkan korupsi yang meluas di antara pegawai pemerintah (lingkungan birokrasi) diperlukan kehadiran korupsi awal sebab utama adanya kondisi itu, dan menjadi sebab adanya kondisi itu, kemudian muncul efek, yang menjadikan korupsi sebagai hal yang jamak.

## PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya dimana berkat ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Interpretasi Korupsi dan Potlach dalam Praktik Birokrasi Perguruan Tinggi di Kampus Jemberdi Kampus Jember”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tak lepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Jember, Bapak Moh Hasan
2. Segenap Keluarga Besar Masjid Kalijaga Jember, Lebih Khusus Keluarga Besar KH Abdul Muchith Bin Muzadi, yang selama inii memberikan ruang dan waktu bagi penulis untuk berjuang, mengabdikan, dan berproses selama di Jember.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
4. Drs. Joko Mulyono, M.Si selaku Ketua Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
5. Lukman Wijaya Baratha, S.Sos., M.A dan Hery Prasetyo, S.Sos., M.Sosio selaku Dosen Pembimbing.
6. Semua dosen pengajar Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
7. Keluarga besar Sosiologi angkatan 2014, Teman, Sahabat Yang berasal dari latar belakang, nasib dan keilmuan yang berbeda.
8. Keluarga besar *Future Leader for Anti Corruption Indonesia* (FLAC Indonesia), terutama FLAC Regional Jember yang telah mengenalkan penulis pada perjuangan melawan korupsi.

9. Sahabat – Sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon FISIP  
UNEJ
10. Teman, Sahabat Seperjuangan, Yulian Adi Kurniawan yang telah membantu persoalan teknis dalam menyelesaikan skripsi ini
11. Semua informan yang tidak dapat penulis sebutkan, terimakasih atas segala informasi yang telah diberikan guna keberlanjutan skripsi ini.

Jember, 8 Oktober 2018  
Penulis,

Aam Waro Panotogomo  
140910302035

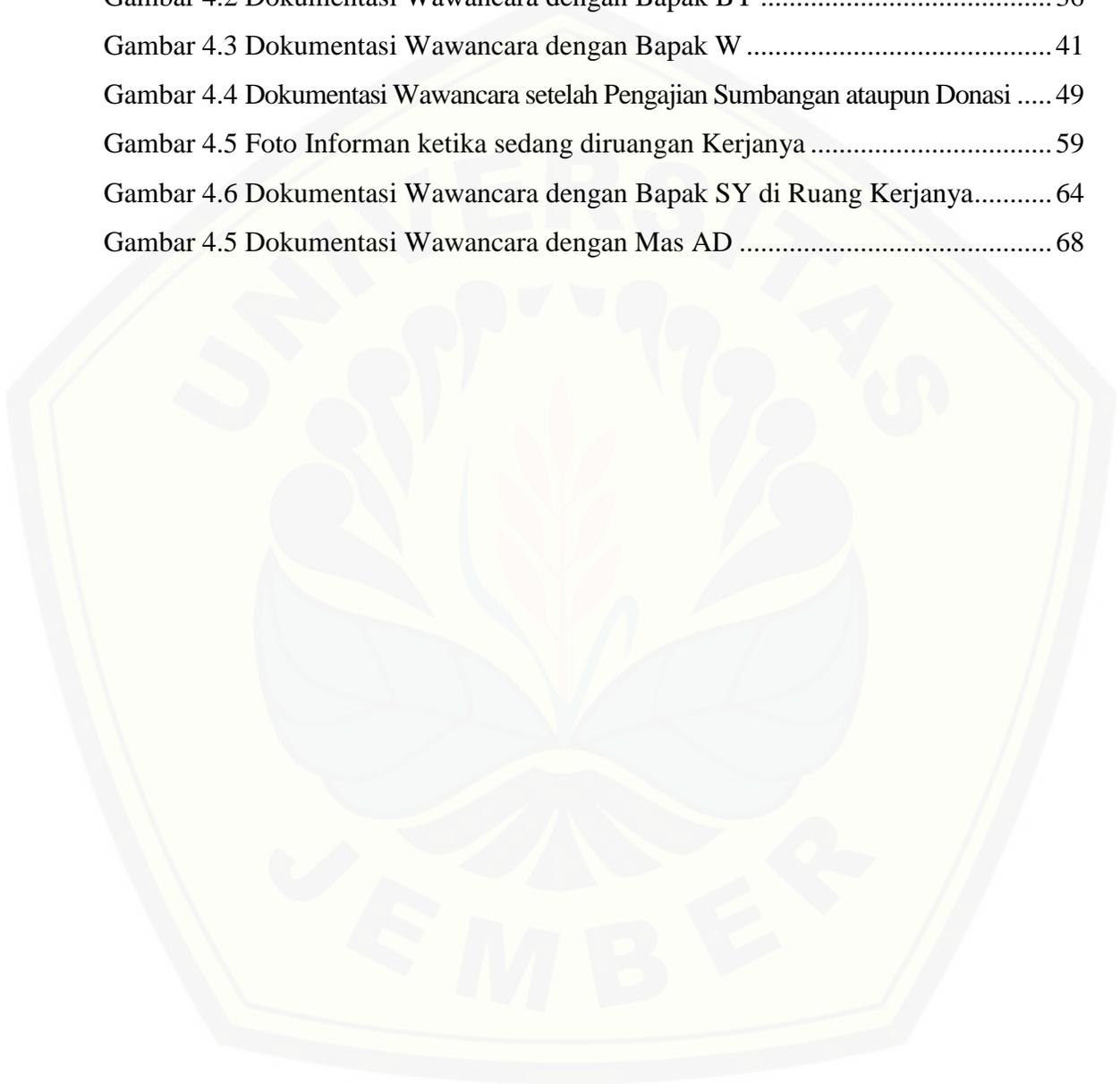
## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR .....	xii
BAB 1. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan.....	6
1.4. Manfaat.....	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....	8
2.1. Kerangka Konseptual .....	8
2.1.1. Kulturalisasi .....	8
2.1.2. <i>Potlach</i> .....	10
2.1.3. Korupsi.....	11
2.1.4. Birokrasi dan Praktiknya.....	15
2.2. Penelitian Terdahulu.....	19
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN .....	22
3.1 Lokasi Penelitian .....	22
3.2 Metode Penentuan Informan .....	23
3.3 Teknik Pengambilan Data .....	24
3.4 Teknik Analisis Data .....	25
BAB 4. PEMBAHASAN.....	29
4.1. Korupsi Dan Interpretasinya.....	31
4.1.1. <i>Jatah</i> : Bagian Dari Timbal Balik Sebuah Usaha .....	32
4.1.2. <i>Lumrah</i> : Perihal Sesuatu Yang di Anggap Wajar .....	34
4.1.3. Uang Tidak Bertuan : Tidak Adanya Kejelasan Kuasa Penggunaan Dana Yang Di Kembalikan Kepada Lembaga .....	37
4.1.4. <i>Wes Anggone</i> : Perilaku yang Tepat dalam Etika Birokrasi .....	40

4.1.5.	<i>Dependence on Strengh</i> : Ketergantungan Yang Kuat Dari Kelompok Kepada Satu Orang .....	43
4.1.6.	Kalkulasi Ekonomis Untuk Setiap Keputusan atau Kebijakan .....	45
4.2.	Interpretasi <i>Potlach</i> .....	46
4.2.1	Barokah : Menggali Nilai Dalam Transaksi Meteri .....	47
4.2.2	Rasuah : Upaya Mengakui Bentuk Kesalahan Dalam Birokrasi .....	50
4.2.3	<i>Ghonimah</i> : Pembagian Wewenang dan Kekuasaan Dari Hasil Kontestasi Birokrasi di Dalam Perguruan Tinggi .....	52
4.2.4	Arisan : Konsekuensi Dari Alur Mutasi Birokrasi .....	54
4.2.5	Shodaqoh : Kontradiksi Nilai Agama dan Budaya Brokrasi .....	57
4.3.	Proses Pembudayaan (Kulturalisasi) Korupsi .....	61
4.3.1	Kulturalisasi secara Individual .....	62
4.3.2	Kulturalisasi Formal .....	64
4.4.	Proses Pembudayaan (Kulturalisasi) Potlatch .....	68
4.5.	<i>Nek golek ojo celutak, nek celutak ojok golek</i> : Tradisionalisme pada sistem Birokrasi .....	74
4.6.	Kultur dan Kekuasaan .....	79
4.7.	<i>Potlach</i> Dan Legitimasi Kekuasaan .....	80
BAB 5.	PENUTUP .....	83
5.1.	Kesimpulan .....	83
5.2.	Saran .....	89
DAFTAR PUSTAKA	.....	93

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Dokumentasi Wawancara dengan Bapak WN .....	33
Gambar 4.2 Dokumentasi Wawancara dengan Bapak BY .....	36
Gambar 4.3 Dokumentasi Wawancara dengan Bapak W .....	41
Gambar 4.4 Dokumentasi Wawancara setelah Pengajian Sumbangan ataupun Donasi .....	49
Gambar 4.5 Foto Informan ketika sedang diruangan Kerjanya .....	59
Gambar 4.6 Dokumentasi Wawancara dengan Bapak SY di Ruang Kerjanya.....	64
Gambar 4.5 Dokumentasi Wawancara dengan Mas AD .....	68



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Penelitian ini membahas tentang bentuk dan interpretasi korupsi yang ada di dalam sistem birokrasi perguruan tinggi, selain korupsi, penelitian ini juga membahas tentang bentuk dan interpretasi *Potlach*, dalam penelitian ini, keduanya akan di lihat dan di dekati dengan kerangka sosiologis, dan secara tegas, peneliti tidak menggunakan penilaian dan pendekatan hukum dalam menganalisis persoalan korupsi ini.

Persoalan korupsi sebenarnya tidak selalu berkaitan dengan persoalan hukum, ada banyak aspek yang menjadi prespektif lain untuk melihat persoalan korupsi ini, dalam penelitian ini akan mencoba mendekati persoalan korupsi dari prespektif sosiologis dan kebudayaan. Persoalan korupsi akan di lihat dari bagaimana setiap orang memaknainya, dalam riset ini mencoba mengambil setting lingkungan birokrasi, yang mana terdapat banyak irisan di dalamnya. Misalnya tentang adanya konsep besar *Potlach*.

Dalam sistem birokrasi identik dengan sebuah sistem administrasi yang rigid, baik dalam tata kelola dan juga pelaporan. Dalam hal ini tentunya ada semacam paradoks, antara hadirnya sistem administrasi yang awalnya di yakini untuk merapikan dan juga menjadikan sebuah sistem yang objektif, transparan dan akuntabel dengan masih adanya keadaan ataupun sub sistem yang sengaja di buat untuk memberikan celah pelanggaran yang mengarah pada perbuatan korupsi.

Masyarakat dengan sistem dan struktur sosial menjadi aspek makro yang menjadi basis argumentasi berperilaku sesuai dengan kondisi sosial yang ada dalam setiap wilayah tertentu. Lebih awal peneliti ingin menggambarkan tentang struktur sosial masyarakat di eropa, asia tenggara hingga wilayah di indonesia. Persoalan tahapan perubahan dan perkembangan masyarakat yang di mulai dari masyarakat primitif, tradisional hingga masyarakat yang memiliki mekanisme birokrasi modern tidak hanya

konsep abstrak yang tidak memiliki implementasi, namun dalam tahapan-tahapan itu selalu bersamaan dengan pola dan mekanisme berperilaku.

Dalam perspektif sejarah bangsa dengan mekanisme birokrasi yang ada di Asia Tenggara, di jelaskan bahwa bangsa Eropa mendesain pemerintahan baru dengan menginfiltrasi beragam konsep-konsep lama yang terkandung dalam budaya pemerintahan negara koloni. Konsep-konsep lama yang diinfiltrasikan melalui memanfaatkan kekuasaan para raja, merubah pola loyalitas; dan merubah bentuk administrasi lama. Usaha negara barat dalam melakukan penetrasi ideologi melahirkan konsolidasi sistem pemerintahan barat dan tradisional budaya lokal karena sulit untuk mengasimilasikan kedua budaya pemerintahan tersebut. Oleh karena itu, sistem politik barat yang berkolaborasi dengan nilai tradisional dalam negara akan selalu menjadi satu dalam sebuah praktik birokratif nya (Fink, Hans. 2010).

Dalam sejarah kolonisasi, Bangsa Eropa juga membentuk pemerintahan baru yang bersifat arbitral terhadap rakyat dari kerajaan-kerajaan, ambisius, dan menghapus kekuasaan tirani di Asia Tenggara untuk mencapai kestabilan dan modernisasi yang berujung pada kesejahteraan nasional. Dalam hal ini secara otomatis mekanisme birokrasi yang ada di dalam sistem birokrasi modern yang di terapkan akan tetap di ikuti dengan mekanis-mekanisme tradisional; sesuai dengan penelitian ini contohnya adalah *potlatch*, perubahan peta perpolitikan di Asia Tenggara tidak hanya berkaitan dengan proses dekolonialisasi, tetapi juga terkait dengan proses penetrasi Ideologi Barat dalam sebuah rezim baru untuk menggeser rezim budaya lokal yang bersifat tradisional (Tarling, 1999).

Dari proses infiltrasi, mekanisme birokrasi bangsa Eropa hingga berujung pada pembentukan pemerintahan baru yang bersifat arbitral, melahirkan berbagai macam perilaku sosial yang menempatkan skema birokrasi dan tradisi secara bersamaan, salah satunya adalah *potlach*.

Menurut Marcel Mauss pemberian (*potlach*), yang menunjukkan bentuk-bentuk dan fungsi-fungsi tukar menukar dalam masyarakat kuno atau arkaik, diperlihatkan bahwa pemberian dan saling memberi yang berlaku dalam masyarakat kuno itu

menghasilkan adanya sistem tukar menukar pemberian yang melibatkan kelompok-kelompok atau masyarakat-masyarakat yang bersangkutan secara menyeluruh.

Bersamaan dengan itu setiap pemberian adalah bagian dari sesuatu sistem tukar menukar (ekonomis) yang saling mengimbangi kehormatan dari si pemberi dan penerima terlibat di dalamnya. Mauss juga menjelaskan sistem tukar menukar ini merupakan suatu sistem yang menyeluruh (total sistem) dimana setiap unsur dari kedudukan atau harta milik terlibat di dalamnya dan berlaku bagi setiap anggota masyarakat yang bersangkutan. Lebih lanjut *potlach* akan kita setarakan interpretasinya dengan bentuk dan pengertian korupsi dalam praktik birokrasi modern saat ini.

Di dalam persoalan korupsi sebagai salah satu perilaku penyimpangan atas kekuasaan sangat mungkin dilakukan oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun saja. Termasuk dalam praktik birokrasi yang seharusnya menjadi sistem baru bagi diberlakukannya semangat anti korupsi malah justru mengindikasikan berbagai peluang akan kesuburan perilaku yang dianggap menyimpang tersebut. Masalah korupsi di Indonesia, masih didominasi oleh pendekatan-pendekatan hukum, padahal korupsi bukan hanya persoalan hukum, bisa jadi korupsi adalah hal yang sangat antropologis dan sosiologis. Secara sederhana peneliti mengatakan korupsi tidak saja menjadi persoalan hukum, melainkan juga merupakan persoalan relasi sosial dalam eskalasi kebudayaan.

Konsep tentang korupsi yang dikatakan berdekatan dengan kebudayaan (kultural) dapat kita lihat dari sepenggal cerpen berikut.

“Markesot geli sendiri... “Astagfirulloh”, tiba – tiba menjadi kata sifat, atau bahkan kata benda. Menjadi idiom untuk menggambarkan suatu maksud tertentu. Kalau kita memperoleh sesuatu tidak lewat jalan yang wajar, umpamanya dengan menyogok, kita akan merasa bersalah sehingga mengucapkan “Astagfirulloh”. ..... lama- lama, segala sesuatu yang mengandung substansi seperti itu kita sebut “Astagfirulloh”. Memang begitu cara bangsa kita berbahasa. ....”Tanpa astagfirulloh susah hidup ya, pak?. “O, susah, Nak. Mau apa saja sekarang harus pakai astagfirulloh. Ma u cari kerja, ngurus apa-apa di kantor harus menyediakan astagfirulloh

untuk setiap meja. Sopir-sopir truk barang selalu menyediakan astagfirulloh lima ratusan banyak sekali, dimasukan dalam wadah korek, disetorkan kepada kondektur-kondektur di tengah jalan. Pokoknya, mau apa saja asal bawa astagfirulloh, ya lancar. Astagfirulloh, ya lancar. Astagfirulloh itu aji-aji sakti yang bisa menembus dinding apa saja. Mau jadi lurah, mau jadi satpam, mau kerja apa saja, mau dapat apa saja, pakailah astagfirulloh.....” (Nadjib, 2015).

Dari penggalan cerpen di atas, secara konsep kita tahu bagaimana budaya itu di mainkan dalam praktik-praktik penyelewengan birokrasi atau yang lebih sering kita sebut sebagai korupsi itu. Di Indonesia khususnya, budaya seringkali di klaim atau di sematkan dalam praktik yang tidak sesuai dengan mekanisme yang berjalan atau penyelewengan. Bahwa korupsi merupakan kasus hukum memang tidak bisa dipungkiri, tapi semata melihat korupsi hanya dalam perspektif hukum semata jelas menyederhanakan persoalan. Menjelaskan korupsi hanya sebagai fenomena hukum belaka, cenderung menyederhanakan kompleksitas korupsi, apalagi yang melanda pengelolaan birokrasi dan kekuasaan di Indonesia.

Sejarah panjang korupsi di Indonesia, terutama sejak diberlakukannya sistem pemerintahan modern oleh bangsa kolonial yang di dalamnya mulai mengenal adanya pembagian kekuasaan dan kepemilikan. Proses pembagian kekuasaan dan kepemilikan ini berimplikasi pada batas-batas fasilitas yang sudah diatur sedemikian rupa terkait dengan pengelolaan kewenangan. Transisi sistem kekuasaan yang demikian ternyata tidak mampu mengubah sistem kebudayaan yang selama ini melembaga. Birokrasi modern tidak serta merta menggeser sistem kebudayaan yang berakar dalam tradisi, namun dalam konteks Asia Tenggara lebih khusus Indonesia mekanisme pergeseran tersebut tidak secara holistik, namun ada mekanisme yang berjalan bersamaan antara tradisional dan modern (Tarling, 1999).

Birokrasi modern yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik yang anti pemberantasan korupsi, justru memiliki kecenderungan kuat untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi selalu banyak terjadi dalam lingkungan birokrasi. Tidak saja karena adanya kecenderungan hasrat pribadi,

melainkan juga adanya konstruksi mentalitas yang turut membangun keinginan seseorang melakukan korupsi dari fasilitas atau akses kekuasaan yang dimilikinya.

Lingkup birokrasi yang peneliti pilih adalah perguruan tinggi. Saat ini perguruan tinggi mulai bergerak dari organisasi yang independen menuju organisasi yang terkooptasi dalam praktik birokrasinya. Dalam beberapa hal perguruan tinggi memang terisolasi dari lingkungannya. Tetapi akhir-akhir ini, kekuatan eksternal telah mulai menekan perguruan tinggi. Apa yang terjadi kemudian, Fakultas dan administrator kehilangan kontrol mereka terhadap praktik – praktik yang dilakukan oleh individu dalam sistem atau institusi.

Pada tahap selanjutnya, para profesional akademis sedikit demi sedikit kehilangan otonominya hingga mereka menjadi seperti seorang buruh yang mengerjakan segala sesuatu di bawah kekuasaan birokrasi. Memang, sejak diterimanya konsep birokrasi ke dalam pengaturan organisasi maka dengan cepat sistem birokrasi dipakai dalam mengatur berbagai macam bentuk organisasi, baik milik swasta maupun milik pemerintah. Sistem birokrasi juga tidak hanya digunakan dalam mengatur organisasi perusahaan atau industri, tetapi juga organisasi-organisasi pemerintahan termasuk pendidikan. Hampir semua lembaga pendidikan menerapkan sistem birokrasi dalam mengatur urusan-urusan rumah tangganya, baik urusan yang berkaitan dengan masalah akademik maupun non akademik.

Jember sebagai salah satu daerah atau kota pendidikan di Jawa Timur setelah Malang dan Surabaya memiliki cukup banyak Perguruan tinggi, namun kondisi sosial budaya di Jember sangat berbeda dengan dua kota lain di Jawa Timur yang saya sebutkan di atas. Jember secara kultur dan budaya sangat berdekatan dengan kultur dan kebudayaan Madura, ditambah dengan sebaran pondok pesantren dengan mekanisme dan sistem tradisional yang cukup banyak. Secara tidak langsung tentunya serpihan kultur yang melekat pada sistem tradisional sedikit banyak juga akan mempengaruhi mekanisme birokrasi modern yang diterapkan dalam perguruan tinggi di kampus Jember.

Bagaimana kemudian mekanisme birokrasi yang berdekatan dengan kultur tradisional yang terjadi dalam praktik birokrasi perguruan tinggi menjadi bias untuk ditegaskan, mana yang murni kultur tradisional, mana yang praktik birokrasi modern, dan mana praktik birokratif yang di kulturalkan atau di budayakan (Pembudayaan). Hal tersebut yang melatarbelakangi peneliti untuk menentukan ruang dan lingkup penelitian.

## 1.2. Rumusan Masalah

Konsep tentang korupsi yang di bangun dan interpretasi individu sangatlah menarik untuk kita ketahui, beberapa hal yang akan peneliti temukan, tentunya berkaitan erat dengan interpretasi korupsi dalam konsep dan kerangka cultural, hal-hal yang akan kita jawab adalah:

1. Bagaimana Interpretasi terhadap korupsi oleh individu di dalam sistem birokrasi perguruan tinggi?
2. Bagaimana Interpretasi *Potlach* oleh individu di dalam sistem birokrasi perguruan tinggi?

## 1.3. Tujuan

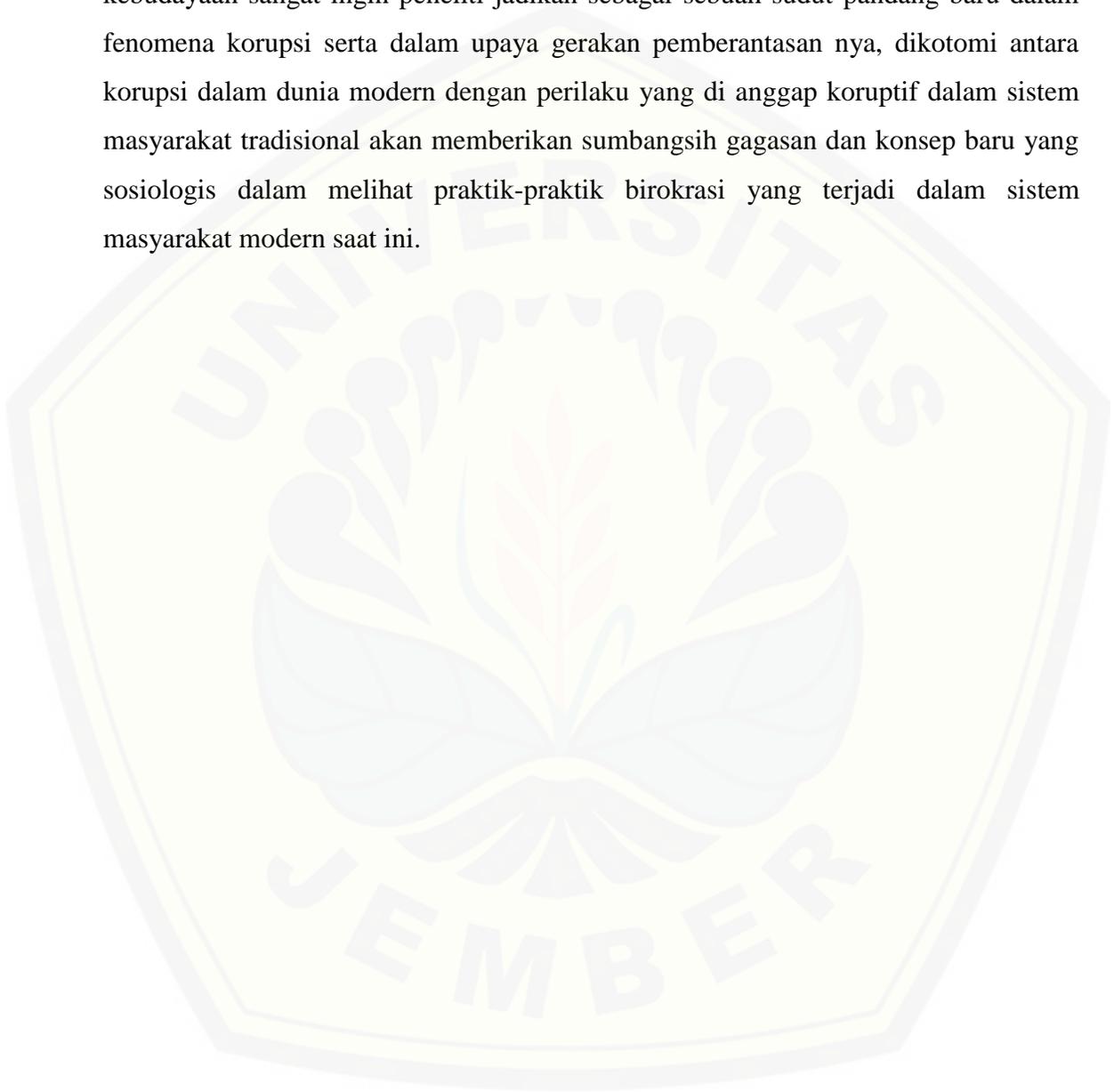
Tujuan dari penelitian yang kami lakukan:

1. Menemukan pemaknaan individu terhadap korupsi dalam praktik birokrasi di Perguruan Tinggi
2. Mengetahui bagaimana proses pemberian atau *potlach* dalam praktik birokrasi terjadi

## 1.4. Manfaat

Kajian sosiologis dalam melihat dan memaknai fenomena korupsi masih sangat minim, mayoritas kajian tentang fenomena korupsi identik dengan persoalan hukum atau hanya sebatas penjelasan statistik tentang dampak dan kerugiannya, dalam

penelitian ini, peneliti mencoba memberikan sentuhan dan corak sosiologis dalam melihat persoalan korupsi di Indonesia ini, lebih lanjut pendekatan sosiologi kebudayaan sangat ingin peneliti jadikan sebagai sebuah sudut pandang baru dalam fenomena korupsi serta dalam upaya gerakan pemberantasan nya, dikotomi antara korupsi dalam dunia modern dengan perilaku yang di anggap koruptif dalam sistem masyarakat tradisional akan memberikan sumbangsih gagasan dan konsep baru yang sosiologis dalam melihat praktik-praktik birokrasi yang terjadi dalam sistem masyarakat modern saat ini.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Kerangka Konseptual

#### 2.1.1. Kulturalisasi

Joel S Khan menggambarkan bahwa proses kebudayaan atau proses kulturalisasi (pembudayaan) itu merupakan sebuah pengembangan hubungan antar budaya artinya suatu perbedaan antara garis-garis identitas atau garis-garis budaya dihubungkan melalui proses-proses mekanisme-mekanisme yang beracuan pada wacana di kalangan para cendekiawan.

Dari situ kemudian Khan menekankan bahwa pembudayaan dalam keragaman itulah yang ada di kalangan bangsa Indonesia, yaitu pandangan bahwa hubungan contoh kasus antara pedalaman dengan pesisir dan antara pusat dengan pinggiran, serta bagian dalam dan luar Indonesia, kaya dan miskin, kuat dan lemah adalah hubungan antara budaya yang tampaknya menjadi wacana di kalangan para cendekiawan.

Dalam konteks penelitian saya kali ini, proses-proses penyelewengan birokrasi, yang ada dalam praktik birokrasi di Perguruan Tinggi selalu ditampilkan dalam titik silang sengkabut antara modernisme dan tradisionalisme. Di situlah konsep Khan ada dan berjalan. Bagaimana hubungan kebudayaan antara konsep tradisi dan konsep birokratis bertemu dan dihubungkan atau yang disebut oleh Joel S. Khan sebagai hubungan antar budaya itu tadi.

Pembudayaan di sini digunakan dalam pengertian yang cukup luas, yang tidak sekedar mengacu pada komponen perilaku sosial manusia “yang dipelajari ketika kita tumbuh menjadi dewasa”, tetapi pada apa yang oleh penulis dan sebelumnya yaitu *mauss*, disebut sebagai aspek yang bermakna dalam eksistensi manusia.

Dalam penggunaan pengertian ini, kebudayaan menunjukkan dimensi adaptasi manusia yang lebih dari suatu yang diperlukan dengan menggunakan lain, yang memberikan kesaksian pada dimensi kreatifitas manusia yang ekspresif. Oleh karena itu manusia dapat menggunakan bahasa (suatu ciptaan manusia atau budaya untuk

berkomunikasi, atau sebuah perkakas untuk membuat sesuatu) namun kata-kata dan perkakas itu lebih dari sekedar sesuatu yang diperlukan untuk berkomunikasi atau membuat sesuatu, kedua-duanya juga memiliki makna sehingga dapat mengekspresikan sesuatu yang lebih dalam mengenai sifat dan kemampuan manusia.

Jika logika ini kita gunakan untuk melihat atau mengkomparasikan dengan gagasan dari Marcel Mauss akan nampak bahwa sesuatu yang diberikan manusia kepada manusia lain itu selalu memiliki makna-makna yang kemudian tidak sempat dan tidak mampu diberikan secara langsung, artinya ada dua proses untuk memahami makna yang terkandung dalam sesuatu yang diberikan dari manusia ke manusia lain atau dari individu ke individu lain.

Joel S Khan juga menjelaskan bahwa makna segala sesuatu yang diciptakan secara sosial (misalnya bahasa) berbeda dengan fungsinya, bersifat perspesifik di kelompok sosial yang menghasilkannya. Menurut pandangan Herder salah seorang yang pertama kali mengemukakan kritik kaum ekspresifis terhadap utilitarianisme pencerahan, bahasa Perancis, Jerman, dan Inggris bukan sekedar sarana yang kebetulan berbeda untuk mengkomunikasikan dasar naluri manusia yang sama. Semua itu ungkapan jiwa yang sangat berbeda (*Volksgeisten*) dari bangsa Perancis, Jerman, dan Inggris. Jika hal ini kita tarik dalam logika *potlach* atau pemberian, maka segala sesuatu yang kemudian lahir secara sosial maka akan nampak berbeda dengan fungsinya, contoh ketika anak buah memberikan hadiah kepada majikan, maka yang dimaksud bukan hanya sebuah penghargaan saja tapi juga ungkapan jiwa dari seseorang ke orang lain atau dari bawahan ke atasan.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan budaya Indonesia ini selalu melalui proses konstruksi. Kita boleh mulai dengan menyatakan yang sudah jelas bahwa pembicaraan tentang keragaman budaya di Indonesia adalah sebuah konstruksi. Transisi dari suatu kebudayaan ke kebudayaan yang lain hanya dapat ditandai dengan mengacu pada batas administratif yang diciptakan oleh pemerintah atau administrasi birokrasi atau dengan meminta pendapat kepada penduduk setempat tentang identifikasi mereka sendiri terhadap budaya mereka. Artinya proses transisi di

kebudayaan itu akan selalu melibatkan tentang pengakuan klaim atau identifikasi yang diberikan oleh sekelompok orang terhadap suatu produk dari sosial yang kemudian disebut dengan budaya mereka.

## 2.1.2. *Potlach*

Segala bentuk pemberian selalu bersamaan dengan sesuatu pemberian kembali atau imbalan. Semua bentuk transaksi berbeda dalam satu garis hubungan yang berkesinambungan yang disatu kutub pemberian itu bercorak murni, tanpa tuntutan imbalan, dan di kutub lainnya bercorak pemberian yang harus diimbali. Menurut Marcel Mauss pemberian, yang menunjukkan bentuk-bentuk dan fungsi-fungsi tukar menukar dalam masyarakat kuno atau arkaik, diperlihatkan bahwa pemberian dan saling memberi yang berlaku dalam masyarakat kuno itu menghasilkan adanya sistem tukar menukar pemberian yang melibatkan kelompok –kelompok atau masyarakat-masyarakat yang bersangkutan secara menyeluruh.

Bersamaan dengan itu setiap pemberian adalah bagian dari sesuatu sistem tukar menukar (ekonomis) yang saling mengimbangi kehormatan dari si pemberi dan penerima terlibat di dalamnya. Mauss juga menjelaskan sistem tukar menukar ini merupakan suatu sistem yang menyeluruh (total sistem) dimana setiap unsur dari kedudukan atau harta milik terlibat di dalamnya dan berlaku bagi setiap anggota masyarakat yang bersangkutan. Dalam sistem tukar menukar ini setiap pemberian harus dikembalikan dalam suatu cara khusus yang menghasilkan suatu lingkaran kegiatan yang tidak ada habis-habisnya dari generasi ke generasi berikutnya. Nilai dari pengembalian barang yang telah diterima harus dapat mengimbangi nilai barang yang telah diterima, karena bersamaan dengan pemberian tersebut adalah nilai kehormatan dari kelompok yang bersangkutan.

Selanjutnya Mauss menjelaskan bahwa suatu pemberian hadiah adalah sama dengan suatu pemberian (*mana* atau sari kehidupan) dari si pemberi kepada si penerima. Dengan diterimanya suatu benda yang diberikan maka diartikan bahwa si penerima pemberian tersebut telah menerima sari kehidupan si pemberi atau sama

dengan diri si pemberi itu sendiri. Oleh karena itu, si penerima pemberian itu tidak dapat menolaknya karena penolakan itu sama dengan penghinaan terhadap si pemberi tersebut. Itu juga sebabnya mengapa sesuatu pemberian harus diimbali dengan pemberian kembali kepada si pemberi oleh si penerima hadiah. Bila seseorang menolak sesuatu pemberian, di samping dapat dilihat sebagai penghinaan terhadap si pemberi dapat juga diartikan sebagai ketidak mampuan si penerima untuk menerima (mana) atau kehormatan si pemberi. Dalam hal terakhir ini penerima digolongkan kategori yang lebih rendah kedudukannya dibandingka si pemberi. Mengenai *potlach* prinsip yang mendasari berlakunya *potlach* adalah saingan untuk kedudukan sosial dan kehormatan atau gengsi di antara kelompok-kelompok klien. Persaingan ini terpusat di antara individu-individu yang mewakili masing-masing kliennya. Persaingan ini terwujud dalam bentuk saling tukar menukar prestasi yang berupa penghancuran harta milik berharga masing-masing. Keunggulan dalam *potlach*, yaitu yang memperoleh segala kehormatan atau kedudukan sosial adalah yang mampu menghancurkan harta miliknya, yang ketinggian nilainya tidak dapat disaingi atau dikalahkan oleh pihak lawannya atau *potlach* yang berlangsung.

Apa yang saling di pertukarkan dilihat oleh Mauss sebagai prestasi (*achievement*) yaitu nilai barang menurut sistem-sistem makna yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan dan bukan nilai harfiah dari pemberian barang tersebut. Sedangkan dalam masyarakat yang telah mengenal perdagangan (ekonomi/material) tukar menukar pemberian diantara kelompok-kelompok tidak lagi mencakup aspek-aspek estetika, keagaman, moral, dan hukum legal yang tertinggal dalam tukar menukar tersebut hanyalah aspek ekonominya saja.

### 2.1.3. Korupsi

Pada umumnya diakui bahwa korupsi adalah problem yang berusia tua dan semua masyarakat manusia, kecuali yang sangat primitif, dengan derajat yang berbeda-beda dijangkiti oleh korupsi. Masih tergantung pada derajat korupsi dan seperangkat kondisi-kondisi lain dengan tepat sudah dinyatakan bahwa kelangsungan dan

perkembangan suatu tatanan politik, soisial, kultur, ataupun ekonomi tidaklah perlu tersia-sia atau dihilangi oleh kejangkitan korupsi belaka. Beberapa pengamat melangkah lebih jauh dan mengakui bahwa dalam beberapa contoh korupsi telah membantu meningkatkan pengembangan ekonomi dan efisiensi. Sekarang dalam negara-negara yang sedang berkembang, korupsi didalam praktik birokrasi juga dipandang merajalela, atau sekedar berlangsung pemberian-pemberian tradisional pada masyarakat yang menduduki jabatan atau memegang kekuasaan tertentu (Alatas, 1986).

Persoalan korupsi menjadi bagian tersendiri dari praktik birokrasi baik dalam kenegaraan atau organisasi. Beberapa penjelasan ciri tentang korupsi di jelaskan oleh Alatas antara lain:

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang, hal ini tidak sama dengan kasus pencurian misalnya, atau penipuan. Seorang operator terasing yang korup sesungguhnya tidak ada, dan kasus-kasus demikian biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan. Satu contoh adalah pernyataan palsu tentang belanja perjalanan atau rekening hotel. Namun, bahkan disini acapkali ada pengertian diam-diam antara para pejabat yang mempraktekkan penipuan-penipuan demikian untuk membiarkan situasi tersebut terjadi.
- b. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan kecuali dimana ia telah begitu merajalela dan begitu dalam berurat berakar, sehingga individu-individu berkuasa atau mereka yang berada dalam lindungannya tidak terduga untuk menyembunyikan perbuatan mereka. Namun sekalipun demikian, bahkan disinipun motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban atau keuntungan itu tidaklah senantiasa berupa uang. Dalam istilah modern hal ini hampir sama pemaknaanya dengan istilah gratifikasi, namun esensi masalahnya bukan pada kebendaan melainkan pada timbal baliknya.

- d. Mereka yang mempraktekan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum (Birokrasi). Hal ini yang nantinya akan coba saya kaji lebih dalam tentang bagaimana proses “penyelubungan” itu.
- e. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mereka yang mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu. Hal ini kan dapat kita jumpai dalam praktik praktik dalam sistem birokrasi modern.
- f. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan.
- h. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu. Ketika seorang pejabat disuap untuk mengeluarkan suatu lisensi bisnis oleh pihak yang menawarkan pemberian, perbuatan mengeluarkan lisensi itu merupakan fungsi dari jabatannya maupun kepentingannya sendiri, dia berbuat pada kontradiktif ganda. Hal yang sama bisa dikatakan kepada pihak yang memberikan suap. Pemberian dan penerimaan lisensi adalah fungsi kepentingan bisnisnya yang sesuai dengan hukum (birokrasi) namun perlingkungannya pada penyuaipan jelas tidak
- i. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tegas dan pertanggung jawaban dalam tatanan masyarakat. Ia didasarkan atas niat kesengajaan untuk menempat kepentingan umum dibawah kepentingan khusus (Alatas:1987).

Secara lebih lanjut dalam bukunya, Alatas bermaksud maksud untuk menganalisa lebih lanjut konsep korupsi. Dari segi tipologi, korupsi dapat dibagi dalam tujuh jenis yang berlainan. Antara lain, korupsi transaktif, korupsi yang memeras, korupsi infestif, korupsi perkerabatan, korupsi depensif, korupsi otogenik, dan korupsi dukungan. Korupsi Transaktif menunjukkan kepada adanya kesepakatan timbal balik

antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya kepentingan ini oleh kedua-duanya. Korupsi yang memeras adalah jenis korupsi dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya. Korupsi depensif adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri. Korupsi infestif adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian yang langsung dengan keutuga tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.

Korupsi kekerabatan atau nepotisme adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan, dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan norma dan peraturan atau birokrasi yang berlaku. Korupsi dukungan, korupsi jenis ini tidak secara langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain tindakan-tindakan yang dilakukan adalah untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada. Intrik dan kasak-kusuk para pembesar di dalam mesin politik Amerika Serikat merupakan contoh yang tepat.

Dalam beberapa kawasan, kelambatan atau penyesuaian administrasi dan langgengnya pandangan-pandangan lama telah memperparah *problem* korupsi itu. Sebagaimana dilukiskan oleh Wertheim dimana hubungannya dengan Indonesia (pertama-tama) kita harus memperhitungkan bahwa bentuk-bentuk sesudah perang dari apa yang disebut korupsi acapkali masih menyembunyikan peninggalan struktur sosial-tradisional. Para kepala desa misalnya masih tetap tidak digaji sehingga mereka harus bertahan hidup dengan pungutan-pungutan yang sebagian legal sebagian ilegal atas para penduduk. Substruktur birokrasi patrimonial masih memengaruhi nilai masyarakat sementara ikatan-ikatan keluarga tradisional terus berbentuk dengan konsep-konsep moralitas modern tentang masalah-masalah publik, bahkan sampai tahun 1957 dalam beberapa kantor pemerintahan di sumatra barat bisa diamati adanya

suatu kantor tertentu semua pegawainya merupakan dari satu kelompok keluarga yang sama (Alatas, 1986).

Dalam keadaan ini pengembaraan korupsi tidaklah dimaksudkan untuk memberikan penilaian. Istilah-istilah penghianatan, penipuan, dan pelanggaran hukum, dipakai disini dalam artian netral, tanpa menghukumi apakah perbuatan tersebut baik atau buruk bagi masyarakat tertentu, dan lagi disini, baik atau buruk dipandang oleh masyarakat yang bersangkutan.

#### 2.1.4. Birokrasi dan Praktiknya

Birokrasi diartikan sebagai sesuatu yang ada di dalam aparatur administratif pada semua pemerintahan modern, birokrasi mutlak di perlukan untuk memfasilitasi fungsi pemerintah dan demokratisasi, kondisi-kondisi utama dalam masyarakat modern yang mendorong kebutuhan akan adanya birokrasi adalah perekonomian keuangan, kapitalisme, dan organisasi berskala besar. Dimana terdapat perekonomian keuangan, kapitalisme, dan organisasi berskala besar, disanalah birokrasi di butuhkan, termasuk perguruan tinggi sebagai suatu zona yang di dalamnya ada perekonomian, kapitalisme dan lainnya juga membutuhkan birokrasi.

Birokrasi adalah tipe ideal kepegawaian yang mana birokrasi ada di dalam aparatur administratif pada semua pemerintahan modern, secara spesifik saya ingin mengatakan bahwa perguruan tinggi negeri adalah sub atau representasi dari pemerintahan itu. Max Weber menyatakan bahwa birokrasi merupakan sarana paling rasional untuk melaksanakan kontrol imperatif atas tindakan manusia dan dapat mencapai derajat efisiensi teknis yang tertinggi.

Tipe ideal birokrasi oleh Weber merupakan sarana paling rasional untuk melaksanakan kontrol imperatif atas manusia, birokrasi rasional yang bersandar pada otoritas legal rasional yang memiliki lima prinsip antara lain:

1. Standarisasi dan formalisasi
2. Pembagian kerja dan spesialisasi
3. Hierarki otoritas
4. Profesionalisasi
5. Dokumentasi tertulis

Lima hal di atas merupakan prinsip tipe ideal birokrasi, namun dalam pelaksanaannya lima hal itu lah yang menjadi salah satu celah untuk melakukan tindakan korupsi dalam sistem birokrasi itu sendiri (Weber, 1947).

Arti lain disampaikan oleh Morstein Marx. bahwa birokrasi merupakan organisasi skala luas dimana para pejabat melaksanakan otoritas legal rasional dengan menggunakan staf administratif. Otoritas adalah kekuasaan yang diyakini legitimasinya. Basis dari legalitas atas otoritas di dalam birokrasi merupakan legal rasional. Sedangkan otoritas legal rasional bersandar pada kepercayaan terhadap legalitas peraturan yang dapat dianalisis secara ilmiah. ciri pokok dari struktur birokrasi Weber, sebagai berikut:

1. Hierarki
2. Diferensiasi/spesialisasi
3. Kualifikasi/kompetensi (Kadir, 2015).

Hampir semua organisasi selalu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya untuk survive. Memang tidak ada organisasi yang sangat otonom dalam menentukan langkahnya, tetapi bisa jadi satu organisasi lebih otonom dibandingkan dengan organisasi lain. Tingkat otonomi suatu organisasi ketika berhadapan dengan lingkungannya merupakan salah satu determinan penting untuk menentukan bagaimana ia akan diatur. Di sisi lain, ada organisasi yang kelihatannya bebas tetapi sebenarnya selalu ditekan oleh lingkungannya atau otoritas di atasnya. Misalnya sekolah-sekolah

negeri, pada dasarnya mereka selalu di awasi dan ditekan oleh masyarakat yang mereka awasi.

Begitu juga perguruan tinggi, pada saat ini perguruan tinggi mulai bergerak dari organisasi yang independen menuju organisasi yang terkooptasi dalam praktik birokrasinya. Dalam beberapa hal perguruan tinggi memang terisolasi dari lingkungannya. Tetapi akhir-akhir ini, kekuatan eksternal telah mulai menekan perguruan tinggi. Apa yang terjadi kemudian, fakultas dan administrator kehilangan kontrol mereka terhadap praktik – praktik yang di lakukan oleh individu dalam sistem atau institusi.

Pada tahap selanjutnya, para profesional akademis sedikit demi sedikit kehilangan otonominya hingga mereka menjadi seperti seorang buruh yang mengerjakan segala sesuatu di bawah kekuasaan birokrasi. Memang, sejak diterimanya konsep birokrasi ke dalam pengaturan organisasi maka dengan cepat sistem birokrasi dipakai dalam mengatur berbagai macam bentuk organisasi, baik milik swasta maupun milik pemerintah. Sistem birokrasi juga tidak hanya digunakan dalam mengatur organisasi perusahaan atau industri, tetapi juga organisasi-organisasi pemerintahan termasuk pendidikan. Hampir semua lembaga pendidikan menerapkan sistem birokrasi dalam mengatur urusan-urusan rumah tangganya, baik urusan yang berkaitan dengan masalah akademik maupun nonakademik. Meskipun para pakar menyebut birokrasi pendidikan dengan sebutan yang berbeda-beda, tetapi semuanya mengakui adanya birokrasi dalam pengelolaan sekolah atau perguruan tinggi.

Kepemimpinan dalam birokrasi profesional hanya berfungsi menangani gangguan, memelihara atau membatasi tugas-tugas yang berkaitan dengan profesionalit, hal ini kah yang di maksud oleh Weber sebagai salah satu tipe ideal birokrasi. Ciri-ciri mereka adalah sebagai berikut:

- Para profesional membutuhkan otonomi dalam kerja mereka. Karena merasa memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang mereka, maka

mereka membutuhkan kebebasan dari pengawasan dalam menerapkan keahliannya.

- Para profesional biasanya memiliki loyalitas yang terpecah. Mereka memiliki kecenderungan "kosmopolitan" dan memiliki loyalitas yang tinggi kepada "teman-teman seprofesi" mereka pada tingkat nasional, yang kadang-kadang mengalahkan loyalitasnya kepada organisasi lokal.
- Ada tekanan yang kuat antara nilai-nilai profesionalitas dan harapan birokrasi dalam organisasi. Hal ini secara intensif bisa menimbulkan konflik antara pekerja profesional dengan manajer organisasi.
- Para profesional membutuhkan kelompok evaluasi untuk kerja mereka. Mereka percaya bahwa hanya kolega mereka saja yang bisa mengkritisi performansi mereka dan mereka menolak evaluasi dari orang lain, termasuk orang-orang yang secara teknik lebih superior dalam hirarki organisasi. Semua karakteristik di atas akhirnya memotong norma-norma birokrasi tradisional, menolak hirarkinya, struktur kontrol, dan prosedur manajemen. Karena itulah menurutnya, dibutuhkan tipe manajemen berbeda dalam organisasi profesional. Salah satunya adalah dengan cara memecah staf profesional. Maksudnya para profesional dibagi berdasarkan profesi mereka masing-masing ke dalam kelompok-kelompok kecil.

Ada banyak hal dalam birokrasi perguruan tinggi yang memiliki karakteristik yang sama dengan model birokrasi Weber. Sebagaimana dikemukakan pada sub bab sebelumnya bahwa birokrasi Weberian memiliki karakteristik umum, misalnya kompetensi merupakan kriteria yang dijadikan dasar untuk ditunjuk menduduki jabatan, para pejabatnya ditunjuk langsung tanpa pemilihan, gaji ditetapkan langsung berdasarkan jabatan, adanya tingkat wewenang diakui keberadaannya dan dihormati, tugas-tugas bersifat eksklusif dan tidak mengerjakan tugas lain, pola hidup anggota organisasi terpusat pada organisasi, keamanan terjamin jika mengikuti sistem, dan antara individu dan organisasi dibedakan. Berdasarkan kriteria-kriteria di atas maka

Stroup yakin bahwa paradigma birokrasi Weber dapat diterapkan pada perguruan tinggi dan banyak pengamat menyadari adanya faktor-faktor birokrasi terlibat dalam administrasi perguruan tinggi (Stroup, 1966).

Menurut Victor, menyebutkan bahwa diantara karakteristik yang menonjol dari bentuk birokrasi di perguruan tinggi antara lain perguruan tinggi merupakan organisasi kompleks yang berada di bawah kekuasaan pemerintah sebagaimana birokrasi-birokrasi lainnya. Ini merupakan kenyataan yang tidak bisa dielakkan, sehingga memiliki konsekuensi-konsekuensi birokratis tertentu, dalam hal ini sangat jelas bahwa birokrasi dalam perguruan tinggi juga di brackdown dari sistem birokrasi pemerintahan yang ada (Karsidi, 2007).

Perguruan tinggi memiliki hirarki formal di antara pegawai dan ada aturan-aturan tertentu yang mengatur hubungan antar para pegawai. Profesor, dosen, dan asisten peneliti mungkin dianggap sebagai pegawai birokratis seperti dekan. Selain itu dalam birokrasi perguruan tinggi juga ada hubungan komunikasi formal yang harus dihormati bersama.

Proses-proses pengambilan keputusan sangat birokratis, utamanya oleh para pejabat yang bertanggung jawab membuat keputusan tersebut berdasarkan struktur administrasi formal misalnya, keputusan tentang masalah akademik ditangani oleh bagian akademik, keputusan tentang masalah keuangan ditetapkan oleh pejabat bidang keuangan, keputusan dalam bidang administrasi diputuskan oleh pejabat administrasi dan sebagainya.

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

Dalam lingkup penelitian yang mengambil persoalan korupsi sebagai objek penelitiannya, pendekatan sosiologi dan kebudayaan masih sangat minim di jadikan suatu kerangka yang di gunakan untuk melakukan pendekatan dan analisis, beberapa tinjauan yang di lakukan oleh peneliti, kebaruaan yang sedang di lakukan oleh peneliti dalam riset ini adalah menyajikan skema penelitian tentang perilaku korupsi dalam kerangka pendekatan sosiologi dan kebudayaan, hal ini menjadi penting karena

bagaimanapun aspek sosiologis di yakini akan mampu memberikan corak baru dalam riset-riset tentang perilaku korupsi, dari hal itu kemudian peneliti hanya mampu memberikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan rencana penelitian yang menjelaskan tentang konsep korupsi antara lain:

1. Akmad Nasir dalam skripsinya yang berjudul Korupsi dan Ibadah Haji : Studi Tentang Korupsi dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia Semasa Orde Baru (2000), pembahasan yang ada dalam skripsi Nasir menyajikan banyak data tentang penyelewengan dalam pelaksanaan ibadah haji, dalam riset tersebut di jelaskan bahwa adanya penyelewengan yang di lakukan dalam oknum-oknum yang ada dalam sistem birtokrasi. Namun menurut bacaan peneliti, penjelasan konsep korupsi dalam kerangka sosiologis masih minim, pendekatan yang di lakukan juga masih belum membirkan corak khas sosiologi korupsi. Maka celah – celah yang ada dalam riset tersebut menjadi sebuah kekurangan dan akan menjadi landasan kebaruaran dalam riset peneliti kali ini.
2. Listiyono Santoso dan Dewi Meyrasyawati yang di muat dalam jurnal berjudul Model Strategi Kebudayaan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia (2015) menjelaskan bahwa persoalan korupsi tidak bisa di pandang dari prespektif hukum saja, dalam jurnal tersebut di jelaskan bahwa masifnya korupsi ditengarai telah menjadikan fakta korupsi sebagai fakta kebudayaan. Tindakan korupsi sebagai fakta hukum memang mencerminkan bahwa peristiwa korupsi memang merupakan peristiwa hukum, tapi masifnya tindak pidana korupsi memberikan alasan rasional yang kuat bahwa fakta korupsi haruslah tetap diletakkan dalam konteks kebudayaan. Artinya, ada sikap mental dalam tradisi berperilaku masyarakat yang berpotensi memberikan peluang terjadinya korupsi, sekaligus juga membiarkan korupsi selalu terjadi secara terus menerus. Keterkaitan antara mentalitas kebudayaan dengan korupsi menunjukkan bukti bahwa pemberantasan dan pencegahan korupsi tidak bisa hanya

mengandalkan pendekatan hukum, melainkan juga melalui pendekatan kebudayaan.

Dari kedua penelitian terdahulu di atas, peneliti menemukan banyak celah yang masih kosong dari tema besar ini, terutama dari aspek pendekatan sosiologis dalam melihat persoalan korupsi, lebih – lebih pada isue kebudayaannya, dari situ kemudian peneliti bermaksud mengisi celah itu melalui penelitian kali ini.



## **BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN**

Pada penelitian saya kali ini akan menggunakan pendekatan fenomenologi. Alasan mendasar peneliti menggunakan metode fenomenologi dalam penelitian kali ini adalah data-data yang akan dicari merupakan data yang sangat bergantung pada pemaknaan setiap informan dalam penelitian kali ini, misalnya soal interpretasi setiap informan dalam memaknai satu hal yaitu *potlach*, peneliti menganggap bahwa fenomenologi mampu mencari sesuatu yang mendalam untuk mendapatkan satu pemahaman yang mendetail tentang fenomena siswa atau perilaku sosial yang diteliti. Selain itu, intensionalitas yang ditawarkan oleh fenomenologi menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam penelitian kali ini, untuk kepentingan penggalian data yang lebih akurat dan hubungan dengan informan yang harus sustainable maka dirasa sangat perlu menggunakan metode fenomenologis dengan intensionalitas yang menjadi justifikasi metodologinya.

### **3.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah setting sosial informan, penelitian kali ini yang memiliki tuntutan metodologis akan lebih banyak bersentuhan langsung dengan informan, intensionalitas akan menjadi hal yang mendasar untuk efektifitas dan optimalitas penggalian data dari informan, untuk itu dirasa sangat perlu untuk menentukan setting sosial informan. Dalam penelitian kali ini, peneliti memilih lokasi kampus di daerah Jember, sesuai dengan latar belakang yang sudah kami singgung tentang kultur daerah Jember dengan posisi perguruan tinggi yang berada di tengah kultur tersebut menjadi sangat menarik untuk kami teliti. Soal korupsi yang konsepnya berada di tengah sistem birokrasi modern akan banyak ditemukan jika dalam satu waktu yang sama dilakukan mekanisme *potlach* dalam ruang tradisional. Jika dibandingkan dengan lokasi lain kami kira ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan mendasar kenapa peneliti memilih Perguruan tinggi yang ada di Jember antara lain:

- a. Secara jumlah, Kampus di Jember tidak sebanyak kampus yang ada di kota lain, namun mulai dari sekolah tinggi hingga universitas negeri sudah ada di Jember, hal ini nantinya akan membuat peneliti bisa lebih spesifik dalam menentukan lingkup kampus yang akan diteliti menjadi dua, yaitu perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta.
- b. Sampai saat ini, dengan segala keterbatasan pengetahuan, peneliti hanya menemukan proses kulturalisasi *potlach* di kampus Jember, hal ini juga menjadi pertimbangan khusus bagi peneliti untuk menyiapkan dan memaksimalkan penelitiannya nanti
- c. Akses yang lebih sudah didapatkan oleh peneliti, observasi awal sudah pernah dilakukan oleh peneliti, temuan selama observasi yang didapatkan peneliti sangat sesuai dengan konsep dan metode dalam riset kali ini

### **3.2 Metode Penentuan Informan**

Dalam penelitian kali ini, terlebih dahulu kami membangun kesamaan pandangan tentang informan. Informan adalah orang dalam setting penelitian, yang coba dimanfaatkan untuk memberikan dan menjadi tols peneliti untuk mendapatkan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, dalam hal ini setting penelitiannya adalah tentang praktik birokrasi perguruan tinggi.

Kegunaan informan dalam metode fenomenologi bagi peneliti ialah membantu agar secepatnya dan setepat mungkin dapat membenamkan diri dalam konteks setempat, maka kami akan memilih informan yang memang benar-benar ada dalam setting penelitian kami yaitu para birokrat.

Guna memperoleh informasi yang diharapkan, peneliti terlebih dahulu menentukan informan yang akan diminta informasinya, berdasarkan penjelasan tersebut maka informan penelitian adalah Berdasarkan kriteria tersebut dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti memilih informan secara purposif. Teknik purposif sampling digunakan untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui seleksi dan pemilihan informan yang benar-benar menguasai

informasi permasalahan secara mendalam serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data. Purposif memberikan kebebasan peneliti untuk menentukan informan yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Sampling yang dimaksud bukanlah sampling yang mewakili populasi, melainkan didasarkan pada relevansi dan kedalaman informasi, hal ini ditentukan berdasar pada kebutuhan penelitian selama di lapangan yang mencari keterikatan dan relevansi data.

Adapun yang menjadi sumber data utama adalah Informan kunci atau key informan. Sebagai informan awal dipilih berdasarkan metode purposive. Subjek penelitian ini adalah sebanyak 6 subjek, di antaranya adalah 2 Pimpinan lembaga dalam birokrasi kampus, dan 4 pimpinan fakultas dalam kampus baik swasta maupun negeri di Jember.

### **3.3 Teknik Pengambilan Data**

Dalam penelitian kali ini peneliti akan mencoba masuk ke setting agar dapat berhubungan dengan informan sendiri dalam penelitian ini adalah sebagai instrumen yang utama, berikutnya dapat memahami kaitan realitas yang ada di setting birokrasi serta berusaha mengatasi berbagai masalah yang terdapat di lapangan lebih – lebih soal setting riset. Peneliti berusaha berinteraksi dengan subjek secara wajar dan memberi warna terhadap segala perubahan di lapangan. Oleh sebab itu peneliti harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di lapangan.

Hubungan baik antara peneliti dengan subjek penelitian (sebelum, selama, maupun sesudah memasuki lapangan) merupakan kunci utama keberhasilan pengumpulan data. Tingkat kepercayaan yang tinggi akan membantu kelancaran proses penelitian, sehingga data yang diinginkan dapat diperoleh dengan mudah dan lengkap. Peneliti sebelum memasuki lapangan, terlebih dahulu menyiapkan secara baik, dan mengedepankan etika.

Peneliti selama di lapangan selalu berupaya bersikap ramah, berusaha membina hubungan baik dengan subjek agar subjek terbuka memberikan jawaban atas segala pertanyaan yang diajukan peneliti, sehingga data yang dibutuhkan dapat diperoleh,

berikutnya adalah sumber data dokumentasi, yang mana berfungsi sebagai salah satu cara peneliti untuk memahami lebih dalam soal informasi dari informan. Dokumen mencakup semua yang terkait dengan fokus penelitian termasuk pula dalam dokumentasi foto, dokumen data, dan buku. Data diperoleh melalui pengamatan dan peneliti berusaha mengadakan pendekatan melalui pergaulan dengan informan dengan suasana tidak formal yang akan dilakukan dalam ruang-ruang senggang para informan. Jenis data yang dikaji penelitian ini dibatasi pada yang berhubungan dengan fokus penelitian

Dengan analisis data dalam penelitian fenomenologi data dari fenomena sosial yang diteliti dapat dikumpulkan dengan berbagai cara, diantaranya observasi dan interview, baik interview mendalam (*in-depth interview*). *In depth* dalam penelitian fenomenologi bermakna. *In-depth* juga bermakna menuju pada sesuatu yang mendalam guna mendapatkan sense dari yang nampaknya *straight-forward* secara aktual secara potensial lebih *complicated*. Pada sisi lain peneliti juga harus memformulasikan kebenaran peristiwa/kejadian dengan pewawancara mendalam. ataupun *interview*. Data yang diperoleh dengan *in-depth interview* dapat dianalisis proses analisis data dengan Interpretative Phenomenological Analysis sebagaimana ditulis oleh Smith (2009, 79-107).

### 3.4 Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data, peneliti menggunakan *Interpretative Phenomenological Analysis* sebagaimana ditulis oleh (Smith, 2009). Tahap-tahap Analisis data yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

*Reading and Re-reading*. Dengan membaca dan membaca kembali peneliti menenggelamkan diri dalam data yang original. Bentuk kegiatan tahap ini adalah menuliskan transkrip interview dari rekaman audio ke dalam transkrip dalam bentuk tulisan. Rekaman audio yang digunakan oleh peneliti dipandang lebih membantu pendengaran peneliti dari pada transkrip dalam bentuk tulisan. Imajinasi kata-kata dari partisipan ketika dibaca dan dibaca kembali oleh peneliti dari transkrip akan

membantu analisis yang lebih komplis. Tahap ini di laksanakan untuk memberikan keyakinan bahwa partisipan penelitian benar-benar menjadi fokus analisis (Smith, 2009).

Peneliti memulai proses ini dengan anggapan bahwa setiap kata-kata informan sangat penting untuk masuk dalam fase analisis dan data kata-kata itu diperlakukan secara aktif. Membaca kembali data dengan model keseluruhan struktur interviu untuk selanjutnya dikembangkan, dan juga memberikan kesempatan pada peneliti untuk memperoleh pemahaman mengenai bagaimana narasi-narasi partisipan secara bersama-sama dapat terbagi dalam beberapa bagian.

Berikutnya adalah *Initial Nothing* Tahap ini menguji isi/konten dari kata, kalimat dan bahasa yang digunakan partisipan dalam level eksploratori. Analisis ini menjaga kelangsungan pemikiran yang terbuka (*open mind*) dan mencatat segala sesuatu yang menarik dalam transkrip. Proses ini menumbuhkan dan membuat sikap yang lebih familier terhadap transkrip data. Selain itu tahap ini juga memulai mengidentifikasi secara spesifik cara-cara partisipan mengatakan tentang sesuatu, memahami dan memikirkan mengenai isu-isu dalam setting penelitian (Smith 2009).

Deskripsi yang peneliti kembangkan melalui initial notes ini menjadi deskripsi inti dari komentar-komentar yang jelas merupakan fokus dari fenomenologi dan sangat dekat dengan makna eksplisit partisipan. Dalam hal ini termasuk melihat bahasa yang mereka gunakan, memikirkan konteks dari ketertarikan mereka (dalam dunia kehidupan mereka), dan mengidentifikasi konsep-konsep abstrak yang dapat membantu peneliti membuat kesadaran adanya pola-pola makna dalam keterangan partisipan.

Tahap berikutnya adalah data yang asli/original dari transkrip diberikan komentar-komentar dengan menggunakan ilustrasi komentar eksploratory. Komentar eksploratori dilaksanakan untuk memperoleh intisari. Komentar eksploratori meliputi komentar deskriptif (*descriptive comment*), komentar bahasa (*linguistic comment*) dan komentar konseptual (*conceptual comment*) yang dilakukan secara simultan (Smith, 2009).

*Initial Comment* Transkrip Asli Komentar Eksploratory, termasuk komentar deskriptif, komentar bahasa (linguistic) dan komentar koseptual. Setelah memberikan komentar eksploratori peneliti melakukan dekonstruksi (*deconstruction*). Ini membantu peneliti untuk mengembangkan strategi dekontekstualisasi yang membawa peneliti pada fokus yang lebih detail dari setiap kata dan makna dari partisipan penelitian. De-kontekstualisasi membantu mengembangkan penilaian yang secara alamiah diberikan pada laporan-laporan partisipan dan dapat menekankan pentingnya konteks dalam interviu sebagai keseluruhan, dan membantu untuk melihat interrelationship (saling hubungan) antar satu pengalaman dengan pengalaman lain (Smith, 2009).

Setelah dekonstruksi peneliti melakukan tinjauan umum terhadap tulisan catatan awal (*overview of writing initial notes*). Langkah ini dilaksanakan dengan memberikan catatan-catatan eksploratory yang dapat digunakan selama mengeksplor data dengan cara:

1. Peneliti memulai dari transkrip, menggaris bawahi teks-teks yang kelihatan penting. Pada saat setiap bagian teks digarisbawahi berusaha juga untuk menuliskan dalam margin keterangan-keterangan mengapa sesuatu itu dipikirkan dan digarisbawahi dan karena itu sesuatu itu dianggap penting,
2. Mengasosiasi secara bebas teks-teks dari partisipan, menuliskan apapun yang muncul dalam pemikiran ketika membaca kalimat-kalimat dan kata-kata tertentu. Ini adalah proses yang mengalir dengan teks-teks secara detail, mengeksplor perbedaan pendekatan dari makna yang muncul dan dengan giat menganalisis pada level yang interpretative.
3. *Developing Emergent Themes* (Mengembangkan kemunculan tema-tema) Meskipun transkrip *interview* merupakan tempat pusat data, akan tetapi data itu akan menjadi lebih jelas dengan diberikannya komentar eksploratori (*exploratory commenting*) secara komprehensif. Dengan komentar eksploratori tersebut maka pada seperangkat data muncul atau tumbuh secara substansial. Untuk memunculkan tema-tema peneliti

memenej perubahan data dengan menganalisis secara simultan, berusaha mengurangi volume yang detail dari data yang berupa transkrip dan catatan awal yang masih ruwet (*complexity*) untuk di mapping kesalinghubungannya (*interrelationship*), hubungan (*connection*) dan pola-pola antar catatan eksploratori. Pada tahap ini analisis terutama pada catatatan awal lebih yang dari sekedar transkrip (Smith, 2009).

Komentar eksploratori yang dilakukan secara komprehensif sangat mendekati pada simpulan dari transkrip yang asli. Analisis komentar-komentar eksploratori untuk mengidentifikasi munculnya tema-tema termasuk untuk memfokuskan sehingga sebagian besar transkrip menjadi jelas. Proses mengidentifikasi munculnya tema-tema termasuk kemungkinan peneliti mengobrak-abrik kembali alur narasi dari interviu jika peneliti pada narasi awal tidak merasa comfortable. Untuk itu peneliti melakukan reorganisasi data pengalaman partisipan. Proses ini merepresentasikan lingkaran hermeneutik. Keaslian *interview* secara keseluruhan menjadi seperangkat dari bagian yang dianalisis, tetapi secara bersama-sama menjadi keseluruhan yang baru yang merupakan akhir dari analisis dalam melukiskan suatu peristiwa dengan terperinci.

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Korupsi dalam penelitian ini, tidak melibatkan prespektif hukum, konsep yang menjadi alur yang tergambarkan dalam penelitian ini, memperkenalkan corak dan sudut pandang baru untuk melihat dan memaknai korupsi yang sedang terjadi, lebih – lebih pada birokrasi perguruan tinggi. Juga *Potlach* yang menjadi bagian tak terpisahkan dari skema tradisional yang ada pada sistem birokrasi. Perihal fundamental dari bentuk dan perilaku korupsi di Indonesia, khususnya dalam birokrasi perguruan tinggi yang juga merupakan lembaga negara, adalah perkembangan mekanisme tradisional masih melekat dan berjalan seiring dengan sistem birokrasi modern atau di dalam sistem birokrasi juga berjalan tradisonalitas.

Berbagai bentuk proses yang saya temukan menunjukkan adanya kontinuitas atau keajegan yang terus dibangun dan dijaga, perilaku yang secara aturan dalam sistem birokrasi dilarang, namun secara terus menerus dilakukan, sehingga kesadaran akan perilaku yang dilarang akan hilang, dan berganti perilaku yang sebenarnya dilarang menjadi dianggap boleh, hal ini terjadi karena kebiasaan yang terus menerus dilakukan. *Ber-sistem* dan terus berlanjut menjadi salah satu temuan yang cukup menarik dalam penelitian ini, bagaimana kemudian interpretasi korupsi lahir dari setiap individu, yang ada di dalam sistem birokrasi sekaligus ikut andil dalam keberlanjutan perilaku korupsi yang telah membentuk sistem. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Alatas, bahwa untuk menghasilkan korupsi yang meluas di antara pegawai pemerintah (lingkungan birokrasi) diperlukan kehadiran korupsi awal sebab utama adanya kondisi itu, dan menjadi sebab adanya kondisi itu, kemudian muncul efek, yang menjadikan korupsi sebagai hal yang jamak.

Begitupula Anderson, menyebut pandangan yang demikian, kemudian secara pelan membentuk pemahaman bahwa korupsi merupakan hal yang sudah sewajarnya terjadi. Proses panjang itulah yang digambarkan dengan, kesuksesan akan tergantung

juga dari kesanggupan menciptakan suatu alternatif yang koheren, dan meyakinkan terhadap suatu orientasi tradisional yang berakar (Anderson:1990).

Pada akhirnya terjadilah pembiaran dan *pelanggaran* dari apa yang seharusnya menurut tata aturan tidak boleh, menjadi boleh. dan dilaksanakan secara terus menerus. Terlepas dari cara pandang etis, hal tersebut berada dalam asumsi kita untuk begitu mudah memberikan justifikasi sebagai sistem. Selain aspek pembiaran yang terus di bangun, persoalan korupsi bukan semata penyalahgunaan wewenang. Adanya celah yang sengaja di di buat dan di lindungi sebagai salah satu unsur kesengajaan dan pembiaran untuk melakukan suatu hal yang menyimpang dari sistem birokrasi perguruan tinggi. Dengan kata lain ada celah dalam sistem administrasi birokrasi yang sudah ada dan berjalan, bahkan celah tersebut terkesan sengaja di-ada-kan, untuk kemudian mengakomodir segala niat penyalahgunaan wewenang untuk mengelola uang yang tak bertuan tadi itu. Seperti halnya yang di jelaskan oleh Alatas, bahwa korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang. Lebih jauh dari itu, informan saya memberikan gambaran kongkrit bahwa bukan semata penyalahgunaan wewenang, namun juga bagaimana kemudian mekanisme yang menjadikan wewenang dapat di salahgunakan juga sengaja di buat.

Berikutnya kembali pada soal individu dalam sistem birokrasi yang di anggap akan otomatis terpengaruh oleh sistem tersebut, namun juga ada asumsi bahwa tidak selamanya individu terpengaruh oleh sistem, terkadang individu mempengaruhi sistem, Korupsi adalah bagian dari sistem administrasi, kehadiran individu di anggap hanya menjadi element yang ada pada sistem dan tidak mampu mempengaruhi apapun, walau dengan nilai etika dan moral yang tinggi sekalipun tidak pernah mampu bertahan.

Pada dasarnya, korupsi merupakan bagian dari sistem administrasi yang kemudian di langgengkan dengan bukti bahwa nilai yang melekat pada setiap individu akan melebur dengan sistem tadi itu. Karena nilai-nilai etika yang menentang korupsi di kaitkan dengan sistem birokrasi. Weber tidak pernah menyebutkan bahwa nilai-nilai

moral terikat dengan sistem birokrasi, seperti juga halnya nilai yang menentang pembunuhan tidak dikaitkan dengan sistem hukum.

Secara sederhana yang menjadi pokok fundamental dalam konsep dan perilaku korupsi ini adalah hubungan-hubungan yang terbangun antar individu selalu berdasar pada prinsip pasar. Namun tidak adanya pasar yang kuat dan perilaku ekonomi yang dikendalikan oleh perhitungan-perhitungan rasional mendorong tumbuhnya hubungan-hubungan yang tergantung pada pertalian yang ditumbuhkan oleh adat kebiasaan dan kekuasaan yang menjurus ke arah nepotisme

Lebih dari itu juga, ada semacam skema yang dibangun secara sadar dan sengaja tentang keterikatan satu objek dengan objek lain, yang disini antara individu yang ada di dalam sistem birokrasi dengan sesamanya atau dengan yang di luar sistem. Keterikatan ini yang kemudian dikatakan sebagai pencipta ketergantungan, soal ketergantungan yang sengaja dan secara sadar di lahir oleh kedua objek tadi, dalam konsepnya Soemarsaid disebut sebagai hubungan *Lurah-Patuh (Tuan-Vasal)*.

Penafsiran korupsi secara fungsional dalam masyarakat yang sedang berkembang benar-benar merupakan pencangkakan analisis fungsional tatap pelik. Pertimbangan seseorang dalam sistem birokrasi selalu berkaitan dengan apa jabatan, wewenang, kekuasaan, dan akses yang dimiliki lalu kemudian akan dikalkulasikan secara material dengan keuntungan yang ia dapatkan dari yang sedang dipertaruhkan. Hubungan yang dijalin atas dasar upah pasar, sehingga segala proses dan perilaku yang terdapat dalam sistem birokrasi ini hanya memperhitungkan soal upah, keuntungan, dan laba dari transaksi yang berjalan, sehingga muara terparahnya yang ada hanyalah mekanisme pasar.

Selanjutnya soal *Potlach* dan interpretasinya yang ada di dalam sistem birokrasi perguruan tinggi di kampus Jember, setidaknya ada beberapa Interpretasi yang dapat, mulai dari rasuah, shadaqoh, *Ghonimah* dan Bentuk rasuah Tanpa ada negosiasi namun ada solidaritas. Anggapan bahwa setiap proses pemilihan jabatan struktural di lingkungan kampus sebagai bentuk peperangan, menjadikan makna *Ghonimah* itu lahir, sebagai konsep untuk melegitimasi apa yang akan dan sudah mereka lakukan.

Pembagian kekuasaan yang telah di dapatkan dari perjuangan bersama untuk memenangi apa yang di sebut sebagai peperangan itu di anggap suatu hal yang wajib, bahkan di haruskan.

Secara ekplisit interpretasi yang kami dapatkankan misalnya tentang pemberian yang dilakukan oleh salah seorang rekans kerja nya dalam birokrasi kampus sebagai bentuk shodaqoh, mencoba keluar dari makna sebenarnya, penjelasan sebagai bentuk shodaqoh disini digunakan untuk memberikan corak agamis pada motif pemberian (*Potlach*), padahal realitanya ada beberapa prasyarat shodaqod yang tidak terpenuhi apabila kita menariknya dalam pendekatan agama, namun terlepas dari itu tampak bagaimana kemudian individu dalam birokrasi selalu menyematkan hal hal yang di luar realita hanya untuk menjadikan dan melegimasi perilakunya sebagai bentuk yang sah dan di perbolehkan secara hukum moral dan kultur yang ada.

*Potlach* juga dimaknai sebagai sebuah pemberian yang secara otomatis memberikan kewajiban untuk mengembalikan. Mengembalikan hadiah pemberian tidaklah kurang kendalanya. Seseorang tidaklah mempunyai hak untuk menolak suatu pemberian hadiah atau sebuah *potlach* melakukan hal itu berarti menunjukkan rasa takut harus membayar kembali dan malu melakukan kegagalan , seseorang akan kehilangan sebagian dari bobot derajat namanya dengan cara mengakui terlebih dahulu sebelum berlaga bahwa dia sudah kalah tetapi dengan keadaan-keadaan tertentu sebuah penolakan dapat diartikan sebagai sebuah pernyataan akan kemenangan yang tak terkalahkan, paling kurang pada kwakiutl nampaknya bahwa kedudukan penting dalam herarki atau kemenangan melalui *potlach*, *potlach* sebelumnya yang memungkinkan seseorang untuk menolak sebuah undangan atau bahkan sebuah pemberian tanpa adanya perang setelah itu. Jika demikian maka sebuah *potlach* haruslah dilakukan oleh seseorang yang telah menolak untuk menerima sebuah undangan bagus lagi dia harus menyumbangkan kepada festival mals sebagainya dimana sebuah upacara mengenai penolakan dapat dipelajarinya.

Kegagalan untuk memberi atau menerima sama dengan kegagalan untuk membalas pemberian yang sama artinya dengan kehilangan rasa harga diri dan

kehormatannya. Kewajiban untuk membayar kembali hadiah-hadiah yang diterima merupakan esensi dari *potlach*. Bentuk pemberian yang saya temukan dalam sistem birokrasi perguruan tinggi di Jember ini tidak melulu berbentuk materi, namun juga ada bentuk pemberian yang bentuknya berupa sifat dan moral, misalnya bentuk perhatian, menjadikan makna lain dari sebuah perhatian, lebih tepatnya mungkin bisa disebut sebagai perhatian *matreil*, yang mana bentuk perhatiannya diwujudkan dengan kebendaan.

Secara sederhana saya ingin mengatakan, segala bentuk yang di nilai menyimpang dari aturan birokrasi, semua menjadi lazim karena mendapat penyematan makna budaya (Kulturalisasi), baik secara tersistem atau pun secara tidak sengaja. Setidaknya saya mengklasifikasi bentuk kulturalisasi menjadi dua, yaitu kulturalisasi secara individu dan kulturalisasi secara formal.

Kulturalisasi secara individual maksudnya adalah proses pembudayaan yang di mulai dari individu, atau individu itulah yang melakukan sebuah proses pemdubayaan atau individu itulah yang menyematkan makna budaya (tradisi) pada perilaku dan perbuatan korupsi. Artinya tidak ada kultur tanpa adanya konstruksi, dalam hal ini nampak bahwa dalam proses kulturalisasi korupsi di konstruksikan oleh individu didalam sistem birokrasi perguruan tinggi yang sedang saya teliti, bagaimana kemudian peran individu juga mampu membangun konstruksi soal korupsi yang di klaim kultur kepada siapapun saja yang ada di dalam lingkaran individu itu tadi, yakni bagaimana kemudian kerjasama antar subjek dalam sistem birokrasi itu bekerja untuk membuat ada dan melanggengkan penyematan kultur itu, akhirnya sesuatu hal yang di tawarkan oleh istri informan kami akan di tolak karena di anggap di luar adat dan formal yang berlaku.

Selain itu, juga ada sebuah sistem yang sedang berjalan di luar diri individu itu dan sudah menjadi adat kebiasaan disana, seperti itu yang kami maksud sebagai kulturalisasi formal, dimana bentuk kulturalisasinya berbasar pada sebuah hal yang sifatnya formal, akan tidak enak jika tidak di jalankan dan juga adanya pelembagaan dan klaim resmi dari apa yang sedang di jalankan yaitu bentuk-bentuk perilaku.

Selain itu semua, pendekatan khas kultur Jawa juga, rasionalitas cenderung di adakan setelah mendahulukan *roso*. Akhirnya sistem birokrasi menjadi layu, dan pendekatan kultur yang kemudian menyuburkan pendekatan rasa yang muara nya pada pemakluman – pemakluman pada hal-hal yang secara aturan birokrasi tidak di perkenankan. Bentuk – bentuk terimakasih yang jelas ada maksud dan motifnya, kemudian terkait keserbarahasiaan yang secara akumulatif hal itu terjadi dan di lakukan oleh salah seorang yang ada pada sistem birokrasi tersebut. Keserbarahasiaan disini juga tidak melibatkan satu orang saja, melainkan ada beberapa orang yang kesemuanya saling percaya dan menjaga serta melindungi. Ada jenis struktur ekonomi dalam masyarakat yang tidak beroentasi pada keuntungan, malah justru sebuah pembororsan, yang di capai itu bukan nilai ekonomis nya, tapi nilai prestis, dan solidaritasnya, maksudnya adalah itu semua tidak di lihat dari nalar ekonomi, dimana itu berjalan, diranah korupsi yang mana ada barang, ada kuasa, ada jasa yang di transaksikan.

Berikutnya adalah *Soal Katub penyelamat*, dimana individu dalam sistem yang harus menjadi katub penyelamat dari perilaku orang lain, ia harus melakukan itu bukan untuk dirinya sendiri, melaikan untuk orang lain, baik secara sadar atau dengan di kondisikan orang lain.

Dari kesemuanya, setidaknya ada tiga konsep besar untuk melihat Kulturalisasi korupsi : Interpretasi *potlach* dalam praktik birokrasi di kampus Jember, antara lain;

- a. Jika menggunakan pendekatan kebudayaan oleh Joel S Khan, maka korupsi tadi di pandang sebagai *culture* (orang yang sedang memainkan kultur) niat nya adalah melakukan tindakan korupsi, namun dalam rangka menyamakan maka di sematkanlah legalitas kultur pada itu
- b. Orang yang sedang melakukan tindakan yang melenceng dari aturan birokrasi, tidak bisa selalu kita maknai perbuatan yang secara sengaja melanggar, atau bahkan orang yang melakukan korupsi pun tidak bisa kita judge sebagai perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok, fakta dalam penelitian saya menunjukkan bahwa tidak selama nya itu untuk

- kepentingan pribadi dan kelompok, ada unsur yang lebih luas dan dalam, terkadang juga pelaku hanya sebagai korban dari sistem yang lebih besar
- c. Selain itu, ternyata ada juga individu yang secara sadar melanggar, sekaligus mengambil jarak dari masalah, dengan menggunakan kekuatan menarik dan menyematkan label kultur dalam setiap tindakan yang secara sadar ia lakukan, sehingga pemakluman akan ia dapat dari perilakunya tersebut.

## 5.2.Saran

Secara Keseluruhan penelitian saya memberikan gambaran yang utuh soal akar dari segala persoalan korupsi, walaupun secara sempit tidak pada persoalan korupsi yang umum, melainkan hanya pada konsep *Potlach* dan juga hanya dalam kerangka birokrasi perguruan tinggi saja, namun saya sangat meyakini bahwa hulu dari kondisi dan permasalahan integritas ada di sini, sedikit banyak penelitian ini mampu memberikan prespektif baru dalam mengenali, menganalisis, mengkaji, dan memahami persoalan itu melalui kerangka yang lebih dalam yaitu kebudayaan. Dari situ kemudian, berbagai rekomendasi atau saran ingin saya sampaikan kepada berbagai element dalam lingkaran isu tentang korupsi ini, antara lain;

- a. Para Akademisi yang fokus pada isu korupsi

Kajian – kajian tentang korupsi yang menggunakan pendekatan sosiologis dan kebudayaan perlu di tingkatkan, keyakinan saya mengenai korupsi yang sama sekali tidak akan bisa jika hanya di lihat dari pendekatan hukum positif, menjadikan saya sangat yakin pula perlu mengarus utamakan prespektif baru dalam melihat dan memaknai korupsi, lebih – lebih di negara kita Indonesia ini, yang sedari awal sudah ada konsep – konsep yang kita negasikan, bahkan cenderung kita nilai sebagai hal negatif dalam melihat persoalan korupsi.

Pendekatan dan prespektif sosiologis selama ini sangat minim di gunakan untuk melihat persoalan korupsi, bagi saya, sosiologi sangat mampu menguraikan serta memberikan penawaran pada persoalan korupsi ini. Dari situ kemudian, meningkatkan kajian dengan menggunakan prespektif yang saya anggap baru ini, yaitu sosiologis sangat perlu di lakukan.

b. Birokrat dalam perguruan tinggi

Berkaitan dengan pelaksanaan sistem birokrasi, seyogyanya perlu di dahulukan kepentingan yang sifatnya umum, terlebih dalam iklim akademik di perguruan tinggi, pelayanan kepada srtiap civitas akademika juga harus berasas keadilan, tidak pandang bulu terkait strata sosial atau posisi apapun. Secara lebih khusus, saya menyampaikan bahwa dalam menjalankan dan menerapkan sistem birokrasi di perguruan tinggi, seharusnya di lakukan dengan profesional berdasar pada asas yang etik yang berlaku, tidak berdasar pada pertimbangan dan kalkulasi ekonomis dalam setiap menjalankan sistem birokrasi ini. Jika kemudian persoalan yang di anggap sebagai kultur itu harus terus menerus di lestarikan, maka sedari sekarang jangan kemudian menjadikan kecurangan dan penyimpangan menjadi hal yang harus di lakukan dengan dalih “Itu adalah Kultur/budaya”, karena pada dasarnya secara konseptual ataupun harus di pisahkan.

c. Para penegak hukum yang berkewajiban menangani persoalan korupsi

Sependek pengetahuan saya pribadi, setiap lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi untuk menanganai persoalan korupsi ini, masih sangat minim menggunakan sudut pandang dan pendekatan kebudayaan dalam mengurai permasalahan ini, serta dalam upaya menanganinya. Perlu saya tegaskan, bahwa sangat mustahil jika agenda besar pemberantasan korupsi hanya di dekati dengan hukum positif saja, menurut saya, korupsi bukan hanya *ansih* persoalan pelanggaran pada hukum saja, lebih besar dari itu, menyangkut sistem dan pembudayaan yang sangat holistik. Maka sangat perlu menambahkan pendekatan serta merumuskan strategi yang melibatkan unsur kebudayaan dan sosiologi dalam ranga pemberantasanya, lebih-lebih pada ranah *Preventif* atau pencegahan nya.

d. *Civil Society Organization* Antikorupsi

Lebih khusus lagi, saya ingin menyampaikan beberapa saran kepada teman-teman yang terlibat aktif dalam gerakan non pemerintahan pemberantasan korupsi, segala advokasi dan kelaborasi antar element yang masif masih sangat perlu dilakukan, secara pribadi dengan skala nasional saya menyadari bahwa masih banyak yang berada di ranah hukum dan pengawalan kasus, sedangkan di bagian pencegahan yang melibatkan unsur dan elemen kebudayaan masih, walaupun ada namun sangat tidak imbang jika di banding dengan yang berada di jalur lain.

Memang konsekuensi logis jika kita memilih pada ranah pencegahan adalah kita memilih “jalan sunyi”, artinya ranah ini adalah ranah yang mungkin sangat minim apresiasi, namun kita harus tetao berada di ranah itu, dengan sangat menyadari bahwa harus ada yang bergerak di ranah ini, karena korupsi sudah sedimikian masif dan sangat tidak mungkin jika hanya berkutat pada ranah advokasi dan

oengawakan kasus saja. Tetap semangat dan konsisten dalam melakdanakan pilihan yang mulia ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alatas, S. H. 1986. *Sosiologi Korupsi Sebuah Perjalanan dengan Data Kontemporer*. Jakarta: LP3ES.
- \_\_\_\_\_. 1987. *Korupsi Sifat, Sebab, dan Fungsi*. Jakarta. LP3ES.
- Benedict, B. R. 1990. Terjemahan oleh Santoso, R. B. *Kuasa Kata: Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia*. New York: Cornell University Press.
- Creswell, J. W. 1994. *Research Design: Qualitative & Quantitative Approach*. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage.
- Emha, A. N. 2015. *Markesot Bertutur*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Fink, Hans. 2010. *Filsafat Sosial: Dari Feodalisme hingga Pasar Bebas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karsidi. 2007. *Sosiologi Pendidikan*. Surakarta: LPP UNS & UNS Press.
- Khan, J. S. 2002. *Membudayakan Daerah Pedalaman Indonesia. Dalam Tania Murray li. 2002. Proses Transformasi Daerah Pedalaman Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2016. Terjemahan oleh Muhibbuddin, M. *Kultur, Miltukultur, Postkultur: Keragaman Budaya dan Imprealisme Kapitalisme Global*. Yogyakarta: INDeS.
- Klitgard, R. 2007. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mauss, M. 1992. *Pemberian: Bentuk dan Fungsi Tukar – Menukar di Masyarakat Kuno*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moertono, S. 2017. *Negara dan Kekuasaan di Jawa Abad XVI-XIX*. Jakarta: KPG.
- Ritzer, G., dan Douglas, G. J. 2012. *Teori Sosiologi Klasik - Post Modern*. Bantul: Kreasi Wacana.

Smith, J. A. 2009. *Psikologi kualitatif: Panduan praktis metode riset. Terjemahan dari Qualitative Psychology a Practical Guide to Research Method.* (Ed). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Stroup, H. H. 1966. *Bureaucracy in Higher Education.* New York: Free Press.

## Skripsi

Akmal, N. S. 2004. "RASUAH? KATAKAN TIDAK". Tidak Diterbitkan. Jurnal Skripsi. Malaysia: Fakultas Pengurusan Awam dan Undang-Undang Md Zawawi Abu Bakar Fakultas Pembangunan Sumber Manusia Universiti Utara Malaysia.

Nasir, A. 2000. "Korupsi Dan Ibadah Haji: Studi Tentang Korupsi Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia Semasa Orde Baru". Tidak Diterbitkan. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Rusli A. 2011. "Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam". Tidak Diterbitkan. Skripsi. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

## Jurnal

Abdul, K. 2015. Prinsip-Prinsip Dasar Rasionalisasi Birokrasi Max Weber pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, Volume 1, Nomor 1.*

Ali Ridlo. 2013. Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab. *Jurnal Al-'Adl 1, Vol. 6 No. 2.*

Santoso, L., dan Meyrasyawati, D. 2015. Model Strategi Kebudayaan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Review Politik, Volume 05, Nomor 01.*

Tarling, N. 1999. Political Structures in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries. Dalam *the Cambridge of Southeast Asia*, Vol. Three, From 1800 to the 1930. Cambridge: Cambridge University Press. Hal. 213-245.

## Internet

Hajaroh, M. 2011. *Paradigma, Pendekatan Dan Metode Penelitian Fenomenologi.* <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132011629/penelitian/fenomenologi.pdf>. [5 September 2017]

- Umar, A. R. M. 2016. “*Kedaulatan Pasca-Kolonial*” dan Asal-Usul Negara di Asia Tenggara. <https://indoproggress.com/2016/11/kedaulatan-pasca-kolonial-dan-asal-usul-negara-di-asia-tenggara/>. [19 Oktober 2017].
- Weber, M. 1947. *The Theory of Social and Economic Organization*, translated by A M Henderson and Talcott Parsons. *The Free Press and the Falcon's Bring Press*. <http://taodesigns.tripod.com/weber/weber47.html>. [3 Juni 2017].
- Wiharyanto, K. 2008. *Pembentukan Negara-Negara Nasional di Asia Tenggara*. <https://www.usd.ac.id/lembaga/lppm/f113/Jurnal%20Historia%20Vitae/vol22no2oktober2008/PEMBENTUKAN%20NEGARA%20kardiyat.pdf>. [20 Oktober 2017]

